



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/36/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menunjuk Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Menunjuk Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

- : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berwenang dan bertanggungjawab :
- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. menyiapkan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KETIGA : Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berwenang dan bertanggungjawab :

- a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
- o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. menyiapkan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penetausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

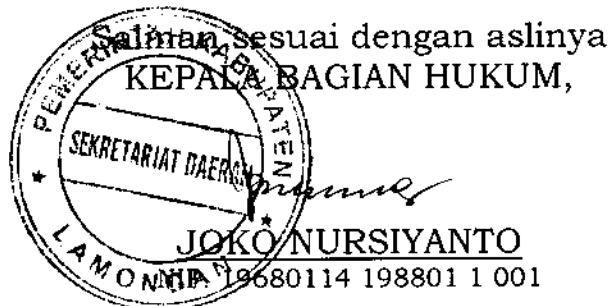
- KEEMPAT : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud diktum KESATU, secara administratif bertanggungjawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu dimaksud.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/36/KEP/413.013/2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

NAMA-NAMA PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
KATEGORI TINGGI :		
1	MARYA VEMBI PERBOWO NIP. 19851117 201001 1 001	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
2	ATIK PRAMULIYANITA UMIYATI, S.E., M.M. NIP. 19740722 200901 2 002	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
3	ISNANIK, S.E. NIP. 19630228 198503 2 007	DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN
4	SUPARDI NIP. 19690115 200701 1 016	DINAS PU. BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN
5	YUDI DWI SUSANTO, S.E. NIP. 19630518 200604 1 004	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN
6	WAHIB ASHARI, S.Kom. NIP. 19820414 201 001 1 016	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN
7	R. PRIMADINI LESTARI, S.E. NIP. 19820509 201101 2 015	RSUD Dr. SOEGIRI KABUPATEN LAMONGAN
8	SUDARYATMO, Amd. NIP. 198603626 201001 1 006	RSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
9	SRI DEWI KUSUMAWATI NIP. 19811115 201001 2 001	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
KATEGORI SEDANG:		
1	ISNA ALFULAILA, S.E. NIP. 19750826 200604 2 020	DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN
2	YANO EKA PRASETYA, S.T. NIP. 19830111 201101 1 007	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMONGAN
3	ADITYA PUTRA PRATAMA MUKTI	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
4	BAMBANG SUYANTO NIP. 19710704 200701 1 016	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMONGAN
5	DEVI RISMAWATI, S.Pi.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN
6	M. REZA AZHAR B.	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
7	ARI WAHYUDI, Amd.	INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN
8	SANDY KISWOYO	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
9	NIKI PERWIRA SARI, Amd NIP. 19860225 201001 2 013	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN
10	MOCH. AINUR ROFIQ SUVI NIP. 19790313 200901 1 004	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN

1	2	3
11	SITI AMINATUZ Z, S.Pd.	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN
12	SUMINEM, S.E. NIP. 19771116 200112 2 004	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
13	HARTATIK, S.Kom. NIP. 19860509 201001 2 013	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
14	FAROH KUMALA DEWI	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
15	SEPTARINA HANDAYANI, S.Kel. NIP. 19800906 201001 2 011	DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN
16	MOH. SYAFI'IN, S.Kom.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMONGAN
17	RINA APRILIA, S.Pd.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
18	ABDUR ROKHIM, S.E.	DINAS KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
19	ALVI LAILIAH, S.E.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LAMONGAN
20	KUSNAN ARIF, S.E. NIP. 19660224 200701 1 009	DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN
21	SUSILOWATI, Amd. NIP. 19820402 201001 2 015	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN
22	HENDRA RANTUNG, S.H. NIP. 19751021 200701 1 005	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
23	EVI NURFAIZAH, SA	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN
24	SUGIANTO, S.H.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMONGAN
25	IMAM KHUSAERI, S.E.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN
26	ADITA WAHYU SETYO N	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN
27	SELAMET HIDAYAT, S.Kom.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN
28	RUSLAN NIP. 19670805 201212 2 004	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAMONGAN
29	ANDI KRISTI NOFEBRIANTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

KATEGORI RENDAH:

1	AGAM BAGUS SYAILENDRA, S.E.	KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN
2	IMAM SANTOSO, S.E. NIP. 19690405 200701 1 029	KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
3	SRI HARTI, S.E.	KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN
4	SITI AISYAH, S.E.	KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN
5	MOCH. KUNTHO DWI FEBRI HADIONO	KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

1	2	3
6	LIK AYAH NIP. 19720810 200801 2 023	KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
7	ANDRI PRASETYO	KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
8	LIS INAYAH NIP. 19640807 200112 2 003	KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN
9	SUDARNARSO NIP. 19690807 200312 1 004	KECAMATAN SARIREJO
10	NUR HANISAH, S.E.	KECAMATAN KEDUNGPRING
11	KHOLIQ SOFYAN, S.E. NIP. 19680504 200701 1 045	KECAMATAN TIKUNG
12	ABDUL BASITH AZHAM, S.Kom.	KECAMATAN BLULUK
13	DIKI ANANTA KRAMAYUDHA	KECAMATAN NGIMBANG
14	RUTIAH	KECAMATAN SUKORAME
15	WAWAN SULISTIONO, S.Kom.	KECAMATAN KEMBANGBAHU
16	MAS'UDI NIP. 19720304 200901 1 003	KECAMATAN BRONDONG
17	VIRDA FIRNANDA ANGGRAINI	KECAMATAN KARANGGENENG
18	HAFIDH SAADILLAH	KECAMATAN LAMONGAN
19	SRI KISWATIN NIP. 19630602 198602 2 001	KECAMATAN DEKET
20	AYU RETNO EKOWATI, S.Pd.	KECAMATAN SEKARAN
21	ISTIROKHAH, S.E. NIP. 19770714 200801 2 002	KECAMATAN MADURAN
22	ANGGARA PURWO JATMIKO	KECAMATAN SAMBENG
23	IING ERLINE THOYYBAH	KECAMATAN SUGIO
24	M. YUSUF DOKHELAN, S.Kom.	KECAMATAN KALITENGAH
25	TITIK NUR ANGGRAINI, S.E.	KECAMATAN GLAGAH
26	HENY PUSPITARINI, S.E. NIP. 19830414 201101 2 012	KECAMATAN BABAT
27	MAFTUKHAN	KECAMATAN LAREN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/36/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019

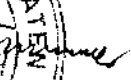
NAMA-NAMA PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

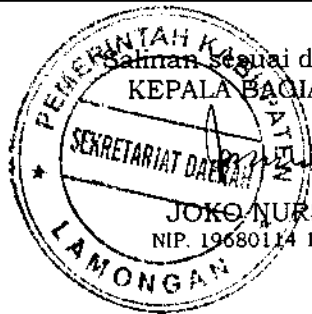
NO.	NAMA	NIP	KETERANGAN
1	2	3	4
I	DINAS PENDIDIKAN :		
1	ERNI, SE		UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN LAMONGAN
2	SITI ZUBAIDAH, S.Pd.I		UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN DEKET
3	MUHAMAD ABDUL GHOFUR		UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TIKUNG
4	SUWANTO	19790409 201406 1 001	UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SARIREJO
5	MUHAMMAD YUSUF, S.Pd	19850511 201001 1 002	UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TURI
6	ABDUL ROCHMAN	19660312 200701 1 033	UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KEMBANGBAHU
7	WAHYU EKO PRASETYO, S.Pd.SD		UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SUKODADI
8	TSALISLAILI CHOIRONI, S.E.		UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PUCUK
9	SIRAM	19640503 200010 1 001	UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SEKARAN
10	ANI RATNA SARI		UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN MADURAN
11	SUKIRMAN, A.Mg.	19721217 201001 1 002	UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGGENENG
12	DIYAN SUPARANTI, S.Pd.	19621111 198903 2 004	UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BABAT
13	DARMAJI	19620108 198612 1 002	UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KEDUNGPRING
14	DWI TUGAS LANGEN NINGSIH, S.E.		UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN MODO
15	SUBANDI, S.E.	19680703 200701 1 023	UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SUGIO
16	SISWANTO, S.Pd.		UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN NGIMBANG
17	DIAN TRI SUJARWO		UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BLULUK
18	HERU SULISTYAWAN, S.Pd.	19850615 200801 1 004	UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SAMBENG
19	PRAYITNO	19630510 198703 1 018	UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN MANTUP
20	DIAN PRASETYO UTOMO		UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SUKORAME
21	APRILIA WIDYA ASTUTI, S.Pd.		UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGBINANGUN
22	ANIITA OKTAVIA, S.Pd.		UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GLAGAH
23	KASRUP, S.Pd.	1972 0601 200901 1 001	UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KALITENGGAH
24	NANANG FAHRONI, S.E.	1982 0115 201001 1 001	UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PACIRAN
25	SUPARTO, S.Pd.	1963 0216 198201 1 001	UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BRONDONG
26	SUHARDI KARYA PURNAMA		UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN LAREN
27	DJUNO	19620612 1989041 001	UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SOLOKURO
28	NUR DWI RAHMAWATI, S.E.		SMPN 1 LAMONGAN
29	YOYOK KUSWOYO		SMPN 2 LAMONGAN
30	KASIM, S.Pd		SMPN 3 LAMONGAN
31	MOCHAMAD THOHA FATWA		SMPN 4 LAMONGAN
32	ESAN		SMPN 5 LAMONGAN

1	2	3	4
33	SHODIG, S.Pd.		SMPN 1 DEKET
34	ASTAMAN AFANDI		SMPN 2 DEKET
35	SUPRAYITNO		SMPN 1 TURI
36	KHOIRUL MEI DWI S		SMPN 1 TIKUNG
37	M. MAKIN MASRUFI		SMPN 1 SARIREJO
38	MILA GALODHA F.		SMPN 1 KEMBANGBAHU
39	SUGENG PRAMONO		SMPN 1 KARANGBINANGUN
40	ANIK TRI LESTARI		SMPN 2 KARANGBINANGUN
41	KHANIYAH, SE	19830210 200901 2 009	SMPN 1 GLAGAH
42	SELVI ISMAWATI	19820521 201406 2 003	SMPN 1 KALITENGAH
43	YANIS EKA ESTANINGTYAS		SMPN 1 SUKODADI
44	IS PURWATI		SMPN 2 SUKODADI
45	BAMBANG MASUDI	19781110 200701 1 012	SMPN 1 KARANG GENENG
46	JUMARIYANTI, S.E., M.M.	19800921 201001 2 001	SMPN 1 MADURAN
47	MUNDHOFAR		SMPN 1 SEKARAN
48	DIAN WAHYUNINGSIH, S.E.		SMPN 2 SEKARAN
49	NUR FADHILAH, SH		SMPN 1 BABAT
50	SYAIFUL ARIF	19780604 200801 1 015	SMPN 2 BABAT
51	KHARIROH NISNGSIH	19670908 198803 2 010	SMPN 3 BABAT
52	HERMIN PRIHATIN		SMPN 4 BABAT
53	NURHADI, S.Pd		SMPN 1 KEDUNGPRING
54	IRMA SURYANI	19821021 200901 2 004	SMPN 2 KEDUNGPRING
55	SULIADI		SMPN 1 SUGIO
56	DWI AGUS INDARTI	19830819 201406 2 003	SMPN 2 SUGIO
57	Dra. HESTI SRI KUNCOROWATI	19670514 200701 2 021	SMPN 3 SUGIO
58	MULYANTO, S.Pd.	19620220 199103 1 010	SMPN 1 MODO
59	EKO BUDI RAHAYU MULYANINGSIH		SMPN 2 MODO
60	EKYK DWI SETIAWAN		SMPN 1 NGIMBANG
61	SUPRIONO		SMPN 2 NGIMBANG
62	PILIPUS MARDI UTOMO		SMPN 3 NGIMBANG
63	GUNANIK		SMPN 1 BLULUK
64	IKA NORA WAHYU WIDIASTUTI, S.E.		SMPN 1 SAMBENG
65	M. YUSUF EFENDI		SMPN 1 MANTUP
66	MATIBIN		SMPN 2 MANTUP
67	AGUS HARIONO, S.Pd.		SMPN 1 PACIRAN
68	KARNO		SMPN 2 PACIRAN
69	SAKIMAN, S.E.		SMPN 1 BRONDONG
70	EDY SURYONO	19830816 200801 1012	SMPN 1 LAREN

1	2	3	4
71	HAFIDLIN	19720223 201406 1 002	SMPN 2 LAREN
72	KUSNAN		SMPN 1 SUKORAME
73	SUPIATUN, S.Pd.	19640228 200701 2 008	SMPN 1 PUCUK
74	EKO WAHYU RAMADLANI, S.E.		SMPN 2 PUCUK
75	M. USMAN	19740509 200801 1 008	SMPN 1 SOLOKURO
II DINAS KESEHATAN :			
1	EKA FITRIANA, Amd. FARM, S.KM.	19850625 200902 2 009	GUDANG FARMASI
2	SITI CHAFSHATOEN, Amd.Keb.	19650913 199001 2 001	UPT PUSKESMAS LAMONGAN
3	NURUL IKA SULISTYOWATI, Amd.Kep.	19830118 201406 2 003	UPT PUSKESMAS DEKET
4	EDY SASMITO	19770610 201406 1 002	UPT PUSKESMAS TURI
5	LIM HANDAYANI, Amd. Kep.	19760829 201001 1 008	UPT PUSKESMAS TIKUNG
6	KUSWAJI	19620711 198401 1 001	UPT PUSKESMAS KEMBANGBAHU
7	MARDIYONO	19650324 198603 1 014	UPT PUSKESMAS NGIMBANG
8	KAMIN	19641225 198801 1 002	UPT PUSKESMAS BLULUK
9	JARWO, S.E.	19710902 199102 1 001	UPT PUSKESMAS SAMBENG
10	FRIGANTI NINGRUM, S.Kep.Ns.	19900204 201504 2 001	UPT PUSKESMAS MANTUP
11	ARDHIAS NUR SANTI	19810106 201101 2 005	UPT PUSKESMAS BABAT
12	KASENO, S.E.	19680916 199401 1 006	UPT PUSKESMAS MOROPELANG
13	SUHARDI, S.E.	19651116 198801 1 001	UPT PUSKESMAS KEDUNGPRING
14	EKY DIRMA ARIFianto, S.E.	19800210 201406 1 002	UPT PUSKESMAS MODO
15	SUPARMAN, S.AP.	19640607 198703 1 008	UPT PUSKESMAS KARANGPILANG
16	SUGENG, S.E.	19681110 199003 1 076	UPT PUSKESMAS SUGIO
17	ANHAR WIYATAMA, S.Kep.Ns.		UPT PUSKESMAS SUKODADI
18	HERIYANTO, Amd.Kep. Ns.	19840026 201101 1 009	UPT PUSKESMAS SUMBERAJI
19	TUGIMIN, S.E.	19690615 199003 1 012	UPT PUSKESMAS KARANGGENENG
20	EKO ARIYANTONO, Amd.Kg.	19800801 201406 1 001	UPT PUSKESMAS SEKARAN
21	WULAN ELOK SASMITA, S.Kep.Ns.	19870513 201504 2 001	UPT PUSKESMAS PACIRAN
22	NURUL MISBAH, Amd.Kep.	19630722 198802 1 002	UPT PUSKESMAS TLOGOSADANG
23	MOH. IRWAN, S.Kep.Ns.	19691018 199403 1 008	UPT PUSKESMAS LAREN
24	HADI,S.E.	19650315 199102 1 004	UPT PUSKESMAS KARANGBINANGUN
25	SUKARPI, Amd.Keb.		UPT PUSKESMAS KALITENGAH
26	WIDI ASTUTIK, Amd.Keb	19770510 201212 2 001	UPT PUSKESMAS GLAGAH
27	BAMBANG SUMANTRI, S.H.	19680323 198903 1 005	UPT PUSKESMAS PAYAMAN
28	QOIRIYAH	19710506 199003 2 001	UPT PUSKESMAS PUCUK
29	SUYIT	19720301 199003 1 002	UPT PUSKESMAS MADURAN
30	MUSTOFA, Amd.Ak.	19780827 201406 1 002	UPT PUSKESMAS DERMOLEMAHBANG
31	SULYONO, S. Kep.Ns	19800407 200604 1 021	UPT PUSKESMAS BRONDONG
32	SUGIANTO, S.Kep.Ns	19710301 199403 1 005	UPT PUSKESMAS SUKORAME

1	2	3	4
33	AHMAD MUHADI	19740721 201406 1 002	UPT PUSKESMAS DRADAH
34	IMAM BASUKI, S.E.	19640917 198711 1 002	UPT PUSKESMAS KARANGKEMBANG
III	SEKRETARIAT DAERAH :		
1	ANDRI IRAWANTO		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
2	ANIK FAHZUNI, S.E.	19760810 200901 2 002	BAGIAN USAHA DAERAH DAN INVESTASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
3	WATIK SUPRPTI, S.H.	19810122 201101 2 003	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
4	DIAH IHDINI AMALIA, Amd.	19760202 201101 2 006	BAGIAN HUMAS, PROTOKOL DAN LAYANAN ASPIRASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
5	ATI RUSMIATI		BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
6	M. SHOLIFUDIN AFANDI	19860131201212 1 002	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
7	IKE PRAWESTY RAHAYU, S.Pd.	19640608 198603 1 002	BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
8	SITI MASRUROH		BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
9	ZULFAH, S.E.		BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
10	ARYA SIGIT BIMANTORO		BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
11	HERU AGUS DARMAWAN	19740202 200801 1 011	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
12	WINDI ARDIANTO, S.E.		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001



BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI